



ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA YOGYAKARTA

Dhea Ayu Puspitasari¹, Herlina Manurung²
Universitas Tidar^{1,2}

dhea.ayu.puspitasari@students.untidar.ac.id¹, herlinamanurung@untidar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. SIPD merupakan platform digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan, serta peningkatan transparansi melalui akses informasi publik. Namun, terdapat juga tantangan teknis seperti masalah jaringan internet dan keterbatasan fitur sistem. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan SDM dan dukungan infrastruktur teknologi untuk memaksimalkan potensi SIPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), efisiensi, transparansi, akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Yogyakarta City. SIPD is a digital platform designed to improve efficiency, transparency, and accountability in regional financial management. This study uses a qualitative approach with data collection methods including in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis. The results of the study indicate that the implementation of SIPD has had positive impacts such as increased efficiency and accuracy of financial reporting, as well as increased transparency through access to public information. However, there are also technical challenges such as internet network problems and limited system features. This study highlights the importance of HR training and technology infrastructure support to maximize the potential of SIPD in realizing good governance.

Keywords : Regional Government Information System (SIPD), Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), efficiency, transparency, accountability,

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau SIPD, merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan sebagai upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan terbuka. SIPD berfungsi sebagai sarana untuk mengelola informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, serta data pemerintah lainnya yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi. Keberadaan sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan serta mengelola informasi pemerintahan dalam sistem yang terpadu. Penegasan penggunaan SIPD dilakukan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang mengatur jangkauan sistem ini mencakup tiga kategori informasi utama: Informasi



Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Lainnya mengenai Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari SIPD adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dengan menyediakan layanan informasi yang terhubung dan terintegrasi secara elektronik, serta untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan efektif. SIPD, sebagai sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0 dan tuntutan Open Government Indonesia, memberikan keuntungan signifikan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat memanfaatkan informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan nasional serta dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mendapatkan kemudahan dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi sistem informasi, sehingga proses perencanaan dan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif secara elektronik. Masyarakat pun memiliki akses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui satu saluran digital, sedangkan pelaku usaha bisa memanfaatkan analisis data pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan dalam investasi.

Penerapan SIPD di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan potensi luar biasa dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu contoh pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan regional. Dengan keberadaan SIPD, BPKAD dapat mengintegrasikan proses manajemen dan keuangan yang sebelumnya terpisah untuk memfasilitasi pemantauan dan manajemen data keuangan secara real time. Sistem ini dimaksudkan untuk melakukan pelaporan wajib pajak dan pembayaran pajak lokal. Sekarang dapat dibuat secara online melalui aplikasi E-SPTPD. Dalam sistem ini, setiap transaksi dapat dipantau secara langsung oleh pejabat pajak, membuat pelaporan pajak lokal lebih cepat dan lebih aman, serta transparan. Memasang peralatan pengawasan di lokasi bisnis wajib pajak Anda akan memungkinkan transaksi BPKAD yang akurat. Ini mematuhi Walikota Yogyakarta Peraturan 57 tahun 2018. Selanjutnya, BPKAD Kota Yogyakarta mengoordinasikan manajemen keuangan regional dengan unit kerja regional (SKPD) untuk memastikan bahwa setiap unit pekerjaan dapat melakukan fungsinya dengan benar. Dalam penilaian ini, BPKAD mengidentifikasi berbagai komentar manajemen keuangan penting yang harus meningkat selama beberapa tahun ke depan. Penggunaan dua sistem manajemen keuangan, Kementerian Dalam Negeri SIPD dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), diharapkan untuk meminimalkan kesalahan teknis dalam manajemen keuangan. Namun secara keseluruhan, penerapan SIPD dan SIPKD di BPKAD Kota Yogyakarta yang digunakan hanya 1 sistem yaitu SIPD yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan regional, tetapi juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam semua aspek. Sistem informasi berbasis teknologi terintegrasi ini dapat diharapkan untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan akses mudah ke informasi kena



pajak yang dibutuhkan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif. Penerapan Efisiensi Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), SIPD) Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu menyampaikan pemahaman komprehensif tentang fenomena sosial, proses kerja dan interaksi yang terjadi dalam penggunaan SIPD di lingkungan pemerintah daerah. Studi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari implementasi SIPD, tetapi juga meneliti proses yang dilakukan selama penerapan sistem, termasuk hambatan teknis dan non-teknis yang diekspos oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan ini, para peneliti dapat mengeksplorasi informasi melalui analisis informasi utama dan interaksi langsung.

Objek penelitian pada BPKAD Walikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Sebagai salah satu peralatan regional yang memainkan peran strategis dalam manajemen keuangan dan aset regional. Fokus penelitian ini adalah menerapkan SIPD sebagai sistem berbasis teknologi informasi, mendukung manajemen keuangan regional yang terintegrasi. Ini berkisar dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Studi ini juga mencakup aspek-aspek seperti efektivitas penggunaan SIPD oleh BPKAD, efek sistem pada efisiensi kerja, dan keterbatasan teknis dan administrasi yang muncul selama implementasi. Selain itu, penelitian ini menentukan bagaimana kebijakan pemerintah daerah mempengaruhi keberhasilan penggunaan SIPD di BPKAD Kota Yogyakarta.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Data Primer yang diterima melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti direktur BPKAD, pengguna sistem berbagai unit pekerjaan terkait. Wawancara dilakukan dalam pendekatan semi-terstruktur untuk membantu para peneliti secara fleksibel memeriksa informasi sesuai dengan pengalaman informan dan pandangan tentang penggunaan SIPD.

Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah pemerintah negara bagian, Laporan Tahunan BPKAD Kota Yogyakarta, pedoman teknis tentang penggunaan SIPD, dan literatur akademik terkait. Sumber data sekunder ini digunakan untuk meningkatkan analisis dan memberikan konteks teoritis dari temuan.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga metode utama: wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumentasi. Secara mendalam, wawancara dengan informan kunci dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman menggunakan SIPD dan pendapat tentang efektivitas sistem yang mendukung tugas manajemen keuangan daerah. Di BPKAD, para peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional dilakukan dengan pengamatan partisipatif untuk mengamati proses kerja dan interaksi antara pengguna sistem dan teknologi SIPD. Teknologi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan penilaian



tentang penggunaan SIPD untuk mengumpulkan pedoman pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan pedoman teknis sistem. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk memudahkan pembaca memahami temuan penelitian secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan di mana peneliti menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan SIPD di BPKAD Kota Yogyakarta, termasuk kelebihan sistem tersebut dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta kendala-kendala yang perlu diperbaiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah agar lebih efisien, transparan, terintegrasi, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). SIPD sendiri merupakan sistem yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk menyediakan layanan informasi pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Penerapan SIPD di lingkungan BPKAD Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait.

Hasil Penerapan SIPD di BPKAD Kota Yogyakarta menunjukkan adanya sejumlah dampak positif yang signifikan terhadap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu hasil utama dari implementasi sistem ini adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai data keuangan dari seluruh unit kerja perangkat daerah (UKPD) sehingga memudahkan proses penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dengan adanya SIPD, BPKAD dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan pencatatan atau duplikasi data yang sebelumnya sering terjadi akibat penggunaan sistem manual atau aplikasi yang tidak terintegrasi. Selain itu, penerapan SIPD juga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui penyajian data keuangan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui portal resmi pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.



Namun demikian, penerapan SIPD di BPKAD Kota Yogyakarta juga menghadapi sejumlah tantangan teknis maupun non-teknis yang perlu mendapatkan perhatian serius agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya. Salah satu kendala teknis yang sering dihadapi adalah masalah jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil sehingga menghambat akses terhadap sistem, terutama pada saat terjadi lonjakan penggunaan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Selain itu, keterbatasan fitur dalam SIPD, seperti ketidakmampuan sistem untuk membuat template laporan secara langsung sesuai dengan kebutuhan spesifik BPKAD, menyebabkan pegawai harus menggunakan aplikasi pendukung lainnya untuk melengkapi fungsi-fungsi tertentu dari SIPD. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIPD memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut agar sistem ini dapat memenuhi kebutuhan operasional secara menyeluruh.

Dalam pembahasan mengenai penerapan SIPD di BPKAD Kota Yogyakarta, penting untuk memahami bahwa keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi informasi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan organisasi secara keseluruhan. Salah satu faktor kunci dalam penerapan SIPD adalah kemampuan pegawai BPKAD untuk mengoperasikan sistem dengan baik dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia secara maksimal. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan program pelatihan dan pendampingan teknis bagi pegawai agar mereka dapat memahami cara kerja sistem serta mampu mengatasi kendala-kendala teknis yang mungkin muncul selama proses operasional. Selain itu, koordinasi antar unit kerja di lingkungan BPKAD juga harus ditingkatkan agar data yang dihasilkan melalui SIPD dapat saling mendukung dan terintegrasi dengan baik tanpa adanya tumpang tindih atau kesalahan informasi.

Di sisi lain, infrastruktur teknologi informasi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penerapan SIPD. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa jaringan internet serta perangkat keras dan lunak pendukung sistem telah memenuhi standar kualitas yang diperlukan agar pengguna dapat mengakses sistem tanpa hambatan teknis. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja SIPD untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai. Dengan demikian, penerapan SIPD tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam pengelolaan keuangan daerah tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hasil wawancara mengenai penerapan SIPD pada BPKAD Kota Yogyakarta menunjukkan beberapa temuan penting yang mencerminkan pandangan dan pengalaman para pegawai serta pihak terkait dalam implementasi sistem ini. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara tersebut:

1. Peningkatan Efisiensi dan Akurasi

Para pegawai BPKAD mengungkapkan bahwa penerapan SIPD telah membawa perubahan positif dalam proses pengelolaan keuangan daerah, di mana mereka merasakan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan



data keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Salah satu pegawai menyatakan, "Dengan adanya SIPD, kami dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan sistem manual."

2. Transparansi dan Aksesibilitas

Beberapa responden juga menekankan pentingnya transparansi yang dihadirkan oleh SIPD, di mana informasi keuangan kini dapat diakses oleh masyarakat melalui portal resmi pemerintah. Seorang anggota tim pengelola SIPD mengatakan, "Kami sangat senang karena masyarakat kini dapat melihat laporan keuangan kami secara langsung, yang tentunya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah."

3. Tantangan Teknis

Meskipun hasil positif terlihat, wawancara juga mengungkapkan adanya tantangan teknis yang dihadapi dalam penerapan SIPD. Beberapa pegawai melaporkan bahwa seringkali mereka mengalami masalah jaringan internet yang menghambat akses ke sistem, terutama pada saat jam sibuk. Salah satu pegawai mengungkapkan, "Kadang-kadang jaringan internet kami tidak stabil, dan itu menjadi kendala saat kami harus mengakses data penting secara mendesak."

4. Keterbatasan Fitur Sistem

Responden juga menyebutkan bahwa terdapat keterbatasan dalam fitur SIPD yang membuat mereka harus menggunakan aplikasi tambahan untuk memenuhi kebutuhan laporan tertentu. Seorang pegawai menyatakan, "Kami berharap ada pembaruan pada sistem agar bisa lebih fleksibel dalam membuat laporan sesuai kebutuhan."

5. Pentingnya Pelatihan dan Dukungan SDM

Sebagian besar responden sepakat bahwa pelatihan bagi pegawai sangat penting untuk memastikan penggunaan SIPD berjalan optimal. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan lebih banyak sesi pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam menggunakan sistem ini. Seorang kepala bagian di BPKAD menekankan, "Kami perlu lebih banyak pelatihan agar semua pegawai bisa memahami dan memanfaatkan semua fitur yang ada di SIPD."

6. Komitmen untuk Perbaikan Berkelanjutan

Para responden menunjukkan harapan bahwa pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM guna mendukung keberhasilan penerapan SIPD. Seorang pejabat senior BPKAD menegaskan, "Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat dan perbaikan berkelanjutan, SIPD akan menjadi alat yang sangat efektif dalam pengelolaan keuangan daerah."

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas manajemen keuangan regional. SIPD memiliki efek positif seperti



mengintegrasikan data keuangan, menciptakan laporan yang lebih akurat dan lebih cepat, dan meningkatkan transparansi bagi publik. Namun, implementasi ini juga menimbulkan tantangan seperti ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan karakteristik sistem, dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan.

Saran

1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan:

Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur jaringan internet untuk memastikan akses yang stabil dan cepat ke SIPD, terutama saat jam sibuk.

2. Mengembangkan Fungsi SIPD:

Provinsi internal perlu memperbarui dan mengembangkan fungsi SIPD untuk menjadi lebih fleksibel dan memenuhi persyaratan spesifik BPKAD saat membuat laporan.

3. Pelatihan dan Bantuan SDM:

Pemerintah Daerah harus memberikan pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis kepada karyawan BPKAD untuk memastikan bahwa mereka dapat mengoperasikan SIPD secara optimal dan mengatasi hambatan teknis yang mungkin timbul.

4. Antara unit kerja:

Koordinasi yang lebih baik antara unit kerja dalam BPKAD untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh SIPD didukung dan terintegrasi dengan baik.

5. Evaluasi Berkala:

Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian kinerja SIPD reguler untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan mengembangkan langkah-langkah peningkatan yang tepat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, dapat diharapkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD di kota Yogyakarta akan lebih efektif dan akan berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas manajemen keuangan regional dan realisasi pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Kebijakan%20SIPD%20Pusdatin%20Kemendagri.pdf>

<https://bpkad.jogjakota.go.id/>

<https://bpka.jogjaprovo.go.id>

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications. 25 Maret 2025